



Membangun Iklim Dunia Usaha Riau Kondusif & Kompetitif

LAPORAN TAHUNAN 2017

**MENYAMBUT GLOBALISASI
MENATA REGULASI MENUJU
INDUSTRI BERKELANJUTAN**



**DEWAN PIMPINAN PROVINSI RIAU
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
THE EMPLOYERS' ASSOCIATION OF INDONESIA**





VISI

TERCIPTANYA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN KOMPETITIF

MISI

- 1. MENGEMBANGKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN PRODUKTIF**
- 2. MELINDUNGI, MEMBELA DAN MEMBERDAYAKAN SELURUH PELAKU USAHA**
- 3. BERPERAN AKTIF DALAM MENINGKATKAN INVESTASI**
- 4. BERPERAN AKTIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU	
PESAN KETUA UMUM DPN APINDO MENYAMBUT 2020	
SUBSTANSI FOKUS OUTLOOK APINDO 2020	
PENDAHULUAN	1
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	3
1. AKTIFITAS INTERNAL	4
A. Pertemuan Internal Kepengurusan	4
B. Pertemuan dengan Members	6
C. Pengelolaan Kesekretariatan	8
D. Penerbitan Dokumen	8
E. Kegiatan Konsolidasi ke DPK	9
F. Menghadiri Acara DPK	10
2. AKTIFITAS PROGRAM KEMITRAAN.....	11
3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN	12
A. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah	13
B. Kegiatan Tingkat Nasional	23
C. Kegiatan Tingkat Regional	24
4. PELAYANAN DATA DPN	24
5. KEGIATAN AUDIENSI	25
6. SEBAGAI NARASUMBER	26
7. SEBAGAI ANGGOTA TIM	27
A. Dewan Pengupahan	27
B. LKS Tripartit	27
C. Pengurus BKSP Riau	27
KEANGGOTAAN	28
TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN	29
1. DASAR H UKUM DEWAN PENGUPAHAN	29
2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU	30
3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR MIGAS	30

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA	32
1. KONDISI DPK SE RIAU	32
2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK	32
3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK	33
 APINDO TRAINING CENTER	 34
A. Kegiatan	34
B. Struktur Manajemen ATC	35
 POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2020	 36
PENUTUP	37

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU



Tahun 2017 sudah kita lalui bersama dengan segala catatan positif maupun negatif. Berbagai tantangan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan investasi menjadi sebuah pelajaran bagi kita pelaku dunia usaha dan pemerintah untuk berfikir serta bertindak lebih konstruktif dan progresif. Bagi dunia usaha nasional yang selama ini telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2017 lalu adalah masa-masa penuh tantangan untuk tetap mampu bertahan atau tumbuh. Hal ini tidak lain karena iklim ekonomi nasional secara nyata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global yang masih fluktuatif dan serba tidak pasti.

Namun demikian dalam pandangan kami, persoalan tumbuh kembangnya dunia usaha nasional dan di Riau sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dalam tatanan dunia global, akan tetapi faktor-faktor internal dalam negeri juga berpengaruh signifikan. Kebijakan atau regulasi yang diluncurkan sering kali juga tidak berimbang dan justru menambah tekanan dan menyulitkan dunia usaha. Sebut saja regulasi tentang lahan gambut, pajak, dan kebijakan harga gas industri. Akan tetapi kami juga secara berimbang ingin mengatakan pula bahwa disisi lainnya terdapat kebijakan positif tentang semakin mudahnya aturan-aturan terkait investasi dan kesempatan berusaha yang patut kita dukung. Pemangkasan sejumlah aturan dan percepatan waktu untuk pengurusan legalitas berusaha telah membuka peluang untuk tumbuhnya dunia usaha.

Kami dari DPP APINDO Riau dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha di Riau dan secara khusus para members kami yang telah mendukung perjuangan APINDO Riau dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di Riau. APINDO sebagai organisasi pengusaha nasional dalam tugasnya mendukung dan melindungi para pelaku usaha negeri ini terus dan akan terus memperkuat diri untuk lebih responsif menyikapi segala kebijakan yang ada agar tetap berpihak kepada dunia usaha. Karena senyatanya pula dunia usaha telah menjadi penopang ekonomi nasional.

Melalui buku Annual Report 2017 ini, kami ingin menyampaikan sejumlah aktifitas yang telah kami laksanakan dalam tugas dan

tanggung jawab kami sebagai pengurus DPP APINDO Riau. Di tahun 2018 ini, sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan masih akan ada bagi DPP APINDO Riau. Untuk itu kami ingin berangkul lebih erat dengan dunia usaha Riau agar kami bisa memposisikan diri sebagai mitra yang berpihak dan bersinergi dalam memacu pertumbuhan dunia usaha. Disisi lain APINDO juga menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan investasi dan iklim dunia usaha agar kondusif. Bagai tali perpilin tiga, Pemerintah, Dunia Usaha, dan APINDO pada nantinya akan menjadi sebuah kekuatan sinergi yang kokoh untuk merebut peluang besar tidak hanya dikancah pasar lokal dan nasional, akan tetapi lebih besar di pasar global dunia yang kini terbuka dengan luas.

Salam sukses, salam dunia usaha.

Pekanbaru, Januari 2018

DPP APINDO Riau

**WIJATMOKO RAH TRISNO
KETUA**

Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2018

Seperti apa yang telah dilakukan di sepanjang 2015 dan 2016, Pemerintah di tahun 2017 terus melanjutkan upaya pembuktian kinerja untuk menopang perbaikan ekonomi serta melakukan reformasi struktural. Tantangan eksternal yang masih tidak menentu yang ditambah dengan kejutan indikator ekonomi beberapa kuartal di 2017 yang berada di bawah harapan berbagai pihak menyebabkan target pertumbuhan ekonomi 2017 belum dapat terealisasi. Faktor-faktor optimisme yang sudah mulai terbentuk nampaknya mulai sedikit bergeming memasuki tahun 2018 ini ditengah situasi ketidakpastian global yang masih mengemuka, dan ditambah dengan arah perbaikan ekonomi nasional yang masih belum sejalan dengan upaya reformasi struktural, terutama memasuki periode pilkada di tahun 2018 serta pesta demokrasi kepemimpinan nasional pada 2019 mendatang.

Dinamika sepanjang tahun 2017 memberikan berbagai fenomena menarik, terutama perkembangan indikator konsumsi yang sempat membingungkan berbagai pihak dan kalangan. Stagnasi indikator konsumsi inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi 2017 secara agregat masih belum dapat beranjak naik dari tren yang telah dicapai sebelumnya di tahun 2016. Namun, relatif stabilnya indikator-indikator makro ekonomi Indonesia di sepanjang 2017 cukup membantu untuk “menenangkan” keadaan. Relatif terjaganya tingkat inflasi rata-rata di bawah 4,00% serta fluktuasi nilai tukar Rupiah selama tahun 2017 yang lebih stabil telah berperan untuk memberi sentimen pasar yang positif, setelah sebelumnya gejolak depresiasi Rupiah telah terlebih dahulu terbentuk di tahun 2015 dan 2016. Setelah pencapaian hasil pertumbuhan kuartal I dan kuartal II 2017 yang tidak terlalu menggembirakan banyak pihak, berbagai kalangan mulai pesimistis terhadap tercapainya target pertumbuhan agregat 2017 sesuai target APBN-P2017. Tidak hanya bagi Pemerintah, realisasi-indikator makro 2017 pun masih belum mampu memenuhi harapan dunia usaha.

APINDO juga mengapresiasi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui instrumen 7-Day Repo Rate yang di awal tahun 2017 berada di level 4,75% untuk kemudian diturunkan ke level 4,50% dan kemudian kembali diturunkan menjadi 4,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan moneter BI adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi yang ada. Tindak lanjut berikutnya yang dibutuhkan dunia usaha adalah kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat menstimulasi perbankan komersial domestik dalam memperbesar pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha produktif. Kondisi neraca perbankan saat ini masih diperberat dengan semakin besarnya Non Performing Loan (NPL) dari kredit untuk sektor konsumtif. Perlunya peralihan paradigma pemberian kredit perbankan kepada sektor-sektor produktif pada akhirnya tidak hanya memperbaiki kinerja neraca keuangan perbankan secara umum, tetapi juga akan memberi ruang bagi dunia usaha domestik, khususnya UMKM, untuk mengajukan pinjaman dari perbankan domestik agar tidak berupaya mencarinya dari sumber-sumber kreditur luar

negeri, yang tentunya dapat menjaga faktor resiko terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi 2016 dan 2017 yang masih di bawah target Pemerintah sempat melandasi revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, termasuk proyeksi APINDO sebesar maksimal 5,20% yang berada di bawah target pertumbuhan 2018 dalam APBN 2018 sebesar 5,40%. Kecuali indikator belanja Pemerintah (G) dan Konsumsi Rumah Tangga (C) yang diperkirakan belum akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2018, maka harapan Pemerintah dan pelaku usaha masih terletak pada kelanjutan perbaikan indikator Investasi (I) dan Perdagangan Internasional (Net Ekspor) kita. Jatuh bangun upaya Pemerintah untuk memaksimalkan perkembangan Investasi melalui perbaikan iklim usaha tidak akan pernah terlepas dari kelanjutan reformasi birokrasi yang terus konsisten dilakukan Pemerintah untuk mengontrol regulasi-regulasi baru yang hanya menghambat kinerja dunia usaha dan investasi. Untuk regulasi di tingkat pusat, Inpres No. 7/2017 telah menjawab kebutuhan tersebut untuk mengatur tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sehingga setiap Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan benar-benar ditujukan untuk menunjang iklim investasi dan dunia usaha yang sehat. Di tingkat regulasi daerah, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada April 2017 yang menganulir kewenangan Eksekutif untuk membatalkan Perda-Perda bermasalah tentunya menjadi faktor yang memperberat upaya Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan adanya keputusan MK tersebut, APINDO berharap agar koordinasi intensif antara Pusat dan Pemda beserta DPRD terus dilakukan secara preventif untuk dapat menghasilkan regulasi-regulasi daerah yang pro investasi dan ramah terhadap pengembangan dunia usaha.

Seperti halnya perkembangan peta politik secara global, APINDO juga tetap mencermati kelanjutan peta politik nasional dan daerah memasuki tahun 2018 yang akan menyelenggarakan ratusan Pilkada serentak sebagai kelanjutan pelaksanaan dari sebagian Pilkada serentak yang telah dilaksanakan di awal 2017. Dalam konteks global, ketidakpastian situasi di Semenanjung Korea, perkembangan kondisi Timur Tengah pasca pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait konflik Israel-Palestina, perkembangan terakhir pasca Brexit, serta dinamika-dinamika politik global lainnya masih menjadi faktor-faktor pertimbangan yang cukup pelik bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dituju di 2018. Sementara itu didalam negeri, Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 yang dapat meminimalisir gejolak sosial serta mampu menghasilkan Kepala-Kepala Daerah baru yang berkarakter sejalan dan seiring dengan kebijakan pusat, dengan kata lain pro investasi dan pengembangan iklim usaha serta penyediaan lapangan kerja. Pelaksanaan Pilkada 2015 yang tenang dan lancar dapat dijadikan contoh dan pedoman yang tepat bagi pelaksanaan dan pengawalan Pilkada 2018 yang aman dan lancar. APINDO berharap kegaduhan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu

tidak berlanjut dalam Pilkada-Pilkada 2018 sehingga diharapkan mampu memberikan suasana kegiatan usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Sementara itu, di lingkup internasional, APINDO mengapresiasi upaya pemerintah di sepanjang 2017 dalam memperluas kerjasama perdagangan bilateral dan regional. Arah kebijakan pemerintah tidak terbatas hanya pada perluasan akses pasar tapi juga mengarah pada diversifikasi pasar. APINDO mencatat terdapat berbagai kerjasama perdagangan yang sedang dirundingkan dengan berbagai negara seperti Chile, negara-negara EFTA, Turki, Iran, dan negara-negara rekanan ASEAN melalui perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), ASEAN-Hongkong dan ASEAN-Kanada. APINDO aktif terlibat dalam perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) yang telah berlangsung dengan baik, juga berharap tercapainya percepatan kesepakatan perundingan kerjasama perdagangan dalam skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) untuk menjamin akses pasar dengan preferensi yang terbaik bagi pelaku usaha Indonesia, memacu percepatan peningkatan standar kualitas produk Indonesia dan sekaligus sebagai trigger terhadap pencapaian kinerja ekspor yang semakin baik hingga saat ini. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan masukan-masukan dari pelaku usaha, khususnya APINDO, agar poin-poin perundingan tidak menjadi blunder yang dapat merugikan kinerja ekspor industri domestik di masa mendatang. Di samping itu, diperlukan juga edukasi bagi pelaku usaha untuk memahami dan mendapatkan manfaat FTA.

Di bidang pembangunan Energi Berkelanjutan, permasalahan kurang menariknya investasi di bidang energi telah diakui banyak pihak. Dan Pemerintah mengantisipasinya dengan beberapa kebijakan yang diformulasikan untuk memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih kompetitif dalam bentuk wacana insentif untuk sektor migas dan feed-in tariff untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT). APINDO mencermati yang tidak kalah pentingnya dengan tingkat pengembalian modal adalah faktor kepastian usaha. Pelaku usaha akan sulit memberikan justifikasi investasi apabila kebijakan ternyata berganti-ganti akibat pergantian pejabat. Kesulitan untuk justifikasi tersebut sangat beralasan, apalagi investasi di sektor ESDM bersifat jangka panjang hingga puluhan tahun. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan disaat awal investasi dilakukan dapat bertolak belakang / berubah total dengan kebijakan Pemerintah 5-10 tahun kemudian. Indonesia pun mau tidak mau harus mengarah cepat ke model tata kelola sektor energi yang berhasil dikembangkan berbagai negara. Ketahanan energi nasional saat ini bukan lagi sekedar jargon yang dapat dimonopoli pemerintah, namun harus menyertakan peran dan masukan aktif investor dan dunia usaha. APINDO tidak akan pernah meragukan regulasi Pemerintah sepanjang kebijakan energi dan implementasinya mulai saat ini dijauhkan dari kepentingan politik sesaat.

APINDO mengapresiasi akan semakin kondusifnya situasi penetapan Upah Minimum (UM)2018 yang berlangsung di akhir 2017 dalam suasana yang aman dan tertib, relatif bila dibandingkan dengan akhir 2015 dan 2016 dalam hal

penetapan UMP untuk tahun berikutnya. Situasi kondusif tersebut tidak terlepas dari kekuatan faktor kepastian yang dimiliki PP 78/2015 dalam hal penetapan UMP, yang telah sesuai dengan tujuan penciptaan regulasi itu sendiri yaitu untuk menciptakan kepastian dan stabilitas iklim usaha dan investasi, yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki produktivitas pekerja. Dunia usaha mengapresiasi sekaligus mencermati kebenaran laporan Kemenaker yang menyebutkan bahwa kenaikan UMP 2018 di seluruh provinsi sudah sesuai dengan PP 78/2015.

Perkembangan pola produksi secara global maupun di kawasan memperlihatkan transisi alat-alat produksi yang mulai beralih ke pola mekanis maupun digital (otomatisasi), terutama dalam sektor-sektor usaha berskala menengah-besar. Mulai bergesernya pola produksi tersebut harus dapat diantisipasi dengan cepat, terutama untuk negara seperti Indonesia yang berkarakter demografis mayoritas penduduk usia produktif. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja tidak boleh hanya berfokus pada dilematis penetapan UMP dari tahun ke tahun dengan segala polemik yang menyertainya, yang justru semakin tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha. Realita nyata sedang berlangsung, otomatisasi semakin menjadi pilihan pelaku industri, dan para pihak tripartit harus cepat mengantisipasinya. Link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha, yang diiringi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan vocational training agar keterampilan pekerja dapat memenuhi kebutuhan industri yang sedang bertransisi ke pola digitalisasi dan otomatisasi. Apabila respon kita berjalan lambat, maka Indonesia tidak dapat menghindari lonjakan tingkat pengangguran di masa mendatang, terutama apabila sektor informal ternyata tidak mampu menampung perpindahan tenaga kerja yang tidak tertampung oleh industri di sektor formal akibat fenomena transisi pola produksi tersebut. APINDO selalu mencermati perkembangan ini dan mengharap agar percepatan penyiapan infrastruktur vocational training di beberapa waktu terakhir agar semakin diintensifkan untuk meminimalisir kondisi mismatch, yang diiringi dengan pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa sehingga Jawa tidak menanggung beban tingkat pengangguran yang semakin berat.

Dalam hal perpajakan, APINDO memberikan apresiasi terhadap kesuksesan pelaksanaan Tax Amnesty (TA) selama Tahap I, Tahap II, serta Tahap III yang telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Amnesty pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan. APINDO ingin melihat reformasi perpajakan yang dilakukan agar diarahkan menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, dan yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus menghindari tumpang tindih pengaturan di antara UU Amnesty Pajak dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, APINDO merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi terhadap besaran tarif PPh Badan serta tarif PPN. Sebagai perbandingan, tax reform yang sedang dilakukan Amerika Serikat ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi domestiknya sekaligus memperbesar minat investasi ke AS. Apabila AS kini mulai beralih ke kebijakan inward looking untuk

mendukung industri, investasi, dan ekonominya, maka APINDO tentunya mempertanyakan komitmen serupa Pemerintah untuk mendukung dunia usaha domestik, salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang ramah investasi dan pro pengembangan usaha. Di kawasan, Singapura juga menyesuaikan tarif PPh Badan ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, APINDO berpandangan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serupa terhadap tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20%, sehingga dunia usaha Indonesia semakin berdaya saing. APINDO juga meminta agar dilibatkan dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta mengenai pengadilan pajak. Diharapkan proses revisi dan perampungan ketiga UU terkait perpajakan tersebut agar dapat segera terselesaikan di awal 2018. Bila Pemerintah mengalami kesulitan di dalam mengandalkan revisi ketiga UU di bidang perpajakan tersebut, APINDO merekomendasikan agar Kemenkeu RI berinovasi lebih lanjut melalui instrumen PP atau Permen. Revisi terhadap tiga UU di bidang perpajakan itu juga agar diikuti perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pajak untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak, dan pada akhirnya Pemerintah dapat mencapai penerimaan perpajakan yang semakin meningkat secara high compliance tanpa membebani kinerja dunia usaha.

Melanjutkan upaya APINDO untuk perbaikan kualitas kebijakan usaha di tahun 2017, APINDO akan terus melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan di tahun 2018, beberapa diantaranya terkait Rencana Revisi UU Persaingan Usaha agar KPPU tidak menjadi super body; implementasi UU Produk Halal agar tidak salah arah dan justru merugikan perekonomian nasional; judicial review UU Pajak dan Retribusi Daerah di MK untuk menghapuskan jenis pungutan yang tidak semestinya, penggantian UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang ternyata belum masuk di dalam daftar Prolegnas prioritas 2018, dan lain sebagainya.

Selain kebutuhan mutlak terhadap penggantian payung hukum UU Ketenagakerjaan, terdapat empat aspek lainnya yang juga menjadi fokus APINDO di 2018 yang berkaitan erat dengan perbaikan regulasi-regulasi di bidang hubungan industrial, diantaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), perijinan tenaga kerja, serta pendidikan vokasi dan pemagangan. APINDO tetap sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. Selain mendukung deklarasi pemagangan nasional bersama Presiden, Kemenaker dan Kadin Indonesia, APINDO telah menerbitkan buku Panduan Pemagangan dan laporan studi best practices pemagangan, serta buku panduan pengembangan ketrampilan untuk siap kerja di beberapa bidang seperti: otomotif dan retail. Diperlukan sinergi kuat antara dunia usaha, pemerintah dan dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi dan kualitas pengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan industri –yang didukung dengan sarana prasarana pelatihan yang memadai dengan optimalisasi pemanfaatan bersama fasilitas swasta dan pemerintah. APINDO juga akan terus mengawal rancangan-rancangan legislasi di 2018 agar dapat menghasilkan produk

hukum yang mampu menopang iklim dunia usaha yang sehat. Pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, revisi UU Persaingan Usaha yang Sehat yang masih berjalan, PP Jaminan Produk Halal, dan PP Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menjadi daftar prioritas Tim Ahli APINDO untuk dicermati agar tidak bertentangan dengan mandat dan rekomendasi dunia usaha, agar tidak melampaui ketaatan regulasi – demi menjamin kelangsungan dan perkembangan bisnis.

APINDO telah memberikan masukan kepada Pemerintah dalam beberapa hal. Pertama, agar pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi belakangan ini. Polemik yang terjadi menjadikan dunia usaha dan investor semakin berhati-hati dan pesimis, terutama memasuki tahun politik 2018. Kedua, agar Pemerintah melanjutkan pemberian insentif kepada dunia usaha terutama di sektor padat karya. Pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di industri padat karya dikarenakan tingginya Upah Minimum. Hal ini menyebabkan tenaga kerja formal mulai menyusut, dan beralih ke informal, sehingga pada akhirnya menunda pembelian / konsumsi. Ketiga, Pemerintah diharapkan meningkatkan proporsi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan pendalaman industri industri prioritas. Hal tersebut untuk memperkuat industri nasional yang berdaya saing tinggi. Berikutnya, Presiden diharapkan mengingatkan kepada jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi, bukan justru berlomba-lomba mempublikasikan berbagai pencapaiannya. APINDO mencermati bahwa Presiden sudah berkomunikasi secara optimis, namun beberapa pembantunya seringkali hanya “mencari panggung”, yang menimbulkan kecemasan dunia usaha.

Sebagai catatan akhir, ikhtisar pandangan dan sumbang pikir yang saya nyatakan tersebut di atas untuk 2018 selalu mengedepankan sinergi dengan seluruh stakeholders APINDO, dalam kerangka optimisme yang tidak pernah pudar. Apabila optimisme yang selalu dijaga dunia usaha tidak dibarengi dengan sinergi yang memadai dengan Pemerintah, Pekerja, maupun stakeholders APINDO lainnya, maka akan mustahil negara kita di 2018 untuk mampu menjauhi siluet kelesuan ekonomi yang menghinggapi di tahun-tahun terakhir bahkan hingga 2017 lalu. Bersama ini saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi sektoral beserta mitra-mitra APINDO di pusat dan daerah, yang terus setia berjalan beriring bersam kami hingga memasuki tahun 2018 sekaligus mempercayakan mandatnya kepada kami dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha nasional, serta tentunya tidak terlepas dari dukungan finansial yang diberikan. APINDO akan selalu berkomitmen untuk menjadi partner strategis Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga kami dapat memenuhi komitmen dan tanggung jawab kami dalam melayani perusahaan anggota APINDO maupun dunia usaha Indonesia secara keseluruhan.

Secara khusus, saya menyambut gembira terhadap terbentuknya PAMI (Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia) di tahun 2017, sebagai bentuk komitmen APINDO dalam menjunjung tinggi kesamaan hak dan keadilan bagi para pencari keadilan

dengan struktur kelembagaan dan susunan tenaga arbiter dan mediator yang objektif, kredibel, profesional dan independen. Saya berharap dengan berdirinya PAMI akan dapat memberikan kontribusi dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan di Indonesia dalam bidang perdagangan, perindustrian dan sektor keuangan yang sangat menentukan bagi kemajuan perekonomian Nasional sehingga Indonesia dapat bersaing secara internasional khususnya di tingkat ASEAN dalam bidang bisnis. Di saat yang bersamaan, saya terus mendorong agar IPC (International Partnership Center) yang telah dibentuk APINDO terlebih dahulu sebelum PAMI berdiri, dengan harapan bahwa melalui bertambahnya usia IPC akan berperan lebih besar dalam menarik masuk investasi asing melalui berbagai upaya business match making, pelayanan informasi kebijakan dan berbagai bentuk fasilitasi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Akhir kata, kepemimpinan yang saya jalankan di APINDO telah memasuki tahun ke-4 seiring dengan dimulainya lembaran tahun 2018. Saya mengapresiasi sekaligus tetap mengharapkan keberlanjutan kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap jajaran Pengurus dan Sekretariat DPN APINDO, DPP dan DPK APINDO seluruh Indonesia, serta dukungan dari seluruh mitra-mitra APINDO yang selalu setia berjalan beriring bersama kami dalam berbagai kondisi dan dinamika yang ada. Di tahun 2018 juga APINDO akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk memilih kepemimpinan nasional APINDO periode 5 tahun mendatang yang saya yakin akan terselenggara dengan baik atas dukungan para pimpinan APINDO dari seluruh 34 provinsi. Saya selalu optimis bahwa peran besar APINDO pada tahun-tahun sebelumnya akan semakin menguat di tahun 2018 melalui sumbang pikiran dan rekomendasi kepada Pemerintah, agar cita-cita besar bangsa ini dapat terwujud melalui komitmen dan kerja kita bersama.

Terima kasih

Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum DPN APINDO

PENDAHULUAN

Provinsi Riau, yang kini mengusung brand sebagai "*The Homeland of Melayu*" merupakan salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dulu mampu menyumbangkan devisa negara terbesar melalui sektor migas. Kontribusi Riau melalui sektor migas secara signifikan telah memberikan pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional disamping tumbuhnya perusahaan-perusahaan eksplorasi dan subkontraktor yang menyerap ribuan tenaga kerja. Namun demikian saat ini Riau memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah di sektor migas yaitu sekitar 2,87 persen. Hal ini disebabkan karena komoditi unggulan Riau tersebut mengalami turbulensi ekonomi secara global sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Riau.

Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia Provinsi Riau pada Agustus 2017 menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Riau pada triwulan II lebih rendah dibandingkan Sumatera dan Nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh penurunan konsumsi pemerintah dan melambatnya pertumbuhan investasi. Disisi lain rendahnya realisasi belanja barang dan jasa modal akibat efisiensi dan rasionalisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau dan proyek tender pemerintah daerah yang masih dalam proses nego ulang juga turut mempengaruhi pertumbuhan investasi daerah.

Masih menurut data KEKR Bank Indonesia bulan November 2017, pada triwulan III 2017 lifting minyak bumi mengalami peningkatan. Namun demikian hal ini juga belum mampu mengkompensasi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Perbaikan harga minyak dunia yang belum optimal saat ini juga belum mampu memberikan insentif bagi produsen minyak bumi. Perusahaan eksplorasi saat ini lebih memilih untuk mempertahankan sumur-sumur produktif dan menutup sumur tidak produktif untuk menahan laju penurunan produksi.

Disektor industri pengolahan pada tahun 2017, industri CPO mengalami perbaikan dengan meningkatnya harga komoditas dunia dan meningkatnya permintaan luar negeri. Kondisi yang sama juga dialami oleh industri pulp dan kertas yang mengalami peningkatan karena meningkatnya populasi penduduk dunia dan berkembangnya industri kemasan berbasis kertas.

Melihat kondisi investasi Riau tahun 2017, pada dasarnya peluang investasi terbuka sangat besar di berbagai sektor dan di berbagai Kabupaten/ Kota di Riau. Sejumlah peluang investasi yang kami catat antara lain yaitu pembangkit energi listrik, industri hilir pengolahan kelapa sawit, biodiesel, industri berbasis petrokimia, pupuk perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan (batu bara, bentonit, koalin, pasir kuarsa, emas, perak), properti, pengembangan pariwisata, industri kehutanan, industri semen, sarang walet, perkapalan, jasa angkut pelabuhan, industri pengolahan tepung ikan, industri arang dan sabut kelapa, karet, dan kakao.

Peluang tersebut belum termanfaatkan dan terwujud dengan baik mengingat pada tahun 2017 terdapat sejumlah masalah yang menghambat masuknya investasi. Kondisi investasi di Riau pada tahun 2017 terhambat dengan alotnya pembahasan tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Ketidakpastian status ruang dan wilayah telah menyebabkan puluhan triliun investasi tidak terealisasi. Melambatnya investasi di Riau dipengaruhi oleh sikap *wait and see* para investor terhadap perkembangan pengesahan RTRW Riau. APINDO secara khusus telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD untuk mendorong kementerian terkait agar segera mengesahkan RTRW Provinsi Riau demi segera masuknya investasi ke Provinsi Riau.

Pada tahun 2017 lalu meskipun iklim dunia usaha dan investasi tidak sesuai harapan kita semua, namun demikian DPP APINDO Riau tetap berupaya berbuat yang terbaik. Melalui laporan ini para member maupun dewan kepengurusan dapat melihat rekam catatan kegiatan DPP APINDO Riau sampai akhir tahun 2017.

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Riau dalam periode tahun 2017 lalu telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam melaksanakan fungsi tugas sesuai visi dan misi APINDO. DPP APINDO Riau berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas produktif sehingga peran dan eksistensi APINDO di Bumi Lancang Kuning ini lebih kuat dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan.

Selanjutnya sebagai pusat perhimpunan para pengusaha, kami sebagai pengurus sangat menyadari bahwa APINDO harus mampu menterjemahkan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang dilahirkan sehingga harus berimbang. Lebih jauh dari itu kebijakan atau regulasi yang dibuat harus berpihak kepada pelaku usaha daerah dimana didalamnya menjadi tempat gantungan hidup orang banyak atau para pekerja. Dalam pentas pembangunan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu diwarnai dengan berbagai persoalan-persoalan yang terkait pada dunia usaha termasuk dunia usaha di Riau. Beberapa diantaranya adalah kebijakan soal listrik, pajak, gas industri, dan terakhir tentang gambut. Hal-hal tersebut menjadi satu kajian bagi APINDO untuk disikapi dengan berbagai upaya. Namun demikian keputusan atas satu regulasi tetap menjadi satu kewenangan pemerintah. APINDO dalam hal ini hanya memberikan pandangan-pandangan secara kritis atas setiap kebijakan yang lahir.

DPP APINDO Riau pada tahun 2017 lalu telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang kami bagi dalam laporan ini menjadi 7 kelompok kegiatan kerja, yaitu:

1. Aktifitas Internal, yaitu kegiatan yang langsung dilaksanakan DPP APINDO.
 - a. Pertemuan internal kepengurusan
 - b. Pertemuan dengan members
 - c. Pengelolaan kesekretariatan
 - d. Penerbitan dokumen
 - e. Kegiatan konsolidasi ke DPK
 - f. Menghadiri acara DPK
2. Aktifitas Program Kemitraan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan DPP APINDO Riau bekerjasama dengan pihak lain.
3. Aktifitas sebagai partisipan kegiatan
 - a. Kegiatan tingkat lokal
 - b. Kegiatan tingkat nasional
 - c. Kegiatan tingkat regional.

4. Pelayanan Data DPN, yaitu kegiatan yang bersifat memenuhi permintaan data dari DPN dan atau meneruskan informasi-informasi dari DPN yang ditujukan ke DPK-DPK APINDO.
5. Kegiatan Audiensi, yaitu kegiatan audiensi dengan mitra-mitra kerja DPP APINDO Riau dalam upaya mempererat hubungan silaturahmi dan menyampaikan informasi terkait aktifitas APINDO.
6. Sebagai narasumber, yaitu memenuhi undangan permintaan sebagai narasumber pelatihan-pelatihan dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan.
7. Aktifitas sebagai Anggota Tim :
 - a. Dewan Pengupahan Provinsi Riau
 - b. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Riau
 - c. Pengurus Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Riau

Berikut laporan selengkapnya seluruh kegiatan yang terbagi kedalam 7 (tujuh) kelompok sebagaimana tersebut di atas.

1. AKTIFITAS INTERNAL

A. Pertemuan Internal Kepengurusan

Kegiatan pertemuan internal kepengurusan pada prinsipnya dilaksanakan secara insidentil dan reguler. Namun pertemuan insidentil menjadi peluang yang lebih cepat dan solusi menyelesaikan persoalan yang ada diantara kesibukan diantara pengurus. Namun demikian perlu kami laporkan kegiatan pertemuan yang secara formil sudah dilaksanakan, yaitu :

1. Rapat Pleno Pengurus pada tanggal 12 Januari 2017 bertempat di Sekretariat DPP APINDO Riau yang dihadiri oleh 12 orang dengan materi bahasan tentang evaluasi 2016 dan rencana kegiatan 2017.



2. Rapat Kerja dan Konsolidasi Provinsi (Rakerkonprov) pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru yang dihadiri oleh 36 orang peserta dari kepengurusan DPP, DPK dan perusahaan member APINDO Riau.



Kegiatan Rakerkonprov ini menghasilkan sejumlah keputusan serta rekomendasi yaitu:

1. Perlu peningkatan kelancaran logistik daerah untuk peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa
2. Akselerasi perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Riau
3. Antisipasi pemerintahan dan pengusaha di Provinsi Riau terhadap berakhirnya kontrak karya PT. Chevron Pacific Indonesia tahun 2021 dan CPP Blok tahun 2022.
4. Akselerasi pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau dengan pendirian badan wakaf ventura serta mempercepat proses perubahan Bank RiauKepri menjadi bank syariah.
5. Bantuan sertifikasi halal untuk UMKM di Riau.
6. Menggesa penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau.
7. Optimalisasi APBD dan peningkatan sharing APBN untuk Riau.
8. Meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun dan mendesiminasi :
 - a. Roadmap investasi Provinsi Riau
 - b. Roadmap ketenagakerjaan Provinsi Riau
 - c. Roadmap kepariwisataan Provinsi Riau
 - d. Roadmap sektor migas Provinsi Riau.
9. Membantu members perusahaan HTI, sawit, dan pulp paper dalam kasus gambut.
10. Konsolidasi dengan perusahaan sektor migas.

B. Pertemuan dengan Members

Pertemuan dengan para members APINDO Riau menjadi satu hal yang kami pandang penting. Tujuan pertemuan tetap menyesuaikan dengan agenda, namun demikian pertemuan ini menjadi penguat hubungan kemitraan antara DPP APINDO dengan members. Pertemuan secara formal dengan para members yang sudah dilaksanakan selama tahun 2017 yaitu :

1. Pertemuan APINDO dengan Perusahaan Jasa Penunjang Migas Riau untuk membahas tentang Perundingan UMSP Migas Riau tahun 2017 pada tanggal 26 Januari 2017 di Sekretariat DPP APINDO



Riau dihadiri oleh 15 orang dari 11 perusahaan sektor migas. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno didampingi Sekretaris DPP Edi Darmawi.

2. Acara Halal Bi Halal bersama members dan mitra DPP APINDO Riau pada tanggal 21 Juli 2017 di Hotel Premiere Pekanbaru dihadiri oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA, Kadisnaker Provinsi Riau, Wakil DPRD Riau, Wahyu Handoko dari DPN APINDO, dan forkompinda Riau. Dalam acara ini juga diserahkan bantuan kepda 64 orang anak panti asuhan



3. Rapat dengan KKKS Migas Riau pada tanggal 18 Agustus 2017 di Sekretariat DPP APINDO Riau tentang Kelangsungan Investasi Sektor Migas dan Kelangsungan Hubungan Industrial. Kegiatan yang



langsung dipimpin Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno ini dihadiri oleh 11 orang yang mewakili 3 perusahaan KKKS migas Riau (Chevron, BOB, dan BSP). Dalam forum ini juga dibahas permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh KKKS yaitu adanya kebijakan pemerintah mengganti skema bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) *cost recovery* menjadi skema PSC Gross Split melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017.

4. Rapat dengan Perusahaan Sub Kontraktor Migas Riau pada tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Sekretariat DPP APINDO Riau yang dihadiri oleh 11 orang dari 5 perusahaan. Pertemuan ini membahas tentang berbagai persoalan aktual yang dihadapi



perusahaan subkontraktor migas terutama dalam ikatan kontrak dengan KKKS sehubungan dengan kondisi migas Riau yang masih belum membaik.

5. Rapat persiapan pembahasan Upah Minimum Sektor Migas 2018 pada tanggal 28 November 2017 di Sekretariat DPP APINDO Riau.



C. Pengelolaan Kesekretariatan

Sekretariat merupakan rumah segala aktifitas dari kepengurusan DPP APINDO. Oleh karena itu sekretariat harus mendapatkan perhatian serius sebagai tempat mengelola segala bentuk kegiatan administratif. Berikut kegiatan pengelolaan kesekretariatan yang sudah dilaksanakan:

1. Perekrutan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau yang baru yaitu Sdr. Arpi Marzuki sebagai pimpinan sekretariat.
2. Pembuatan logo dinding APINDO Riau dari acrylic.
3. Pembuatan papan tulis informasi data kegiatan, DPK, UMP/UMK/UMSP untuk memudahkan dan percepatan informasi di sekretariat.
4. Pembuatan cendramata DPP APINDO Riau untuk keperluan kunjungan ke mitra-mitra kerja.
5. Pengadaan dispenser 1 unit untuk kebutuhan harian sekretariat
6. Service printer 1 unit untuk kelancaran operasional kerja sekretariat.
7. Service laptop kantor 1 unit kelancaran operasional kerja sekretariat.
8. Perbaikan kursi kantor 4 unit kenyamanan kerja sekretariat.
9. Penataan ruangan kantor untuk kenyamanan kerja sekretariat.

D. Penerbitan Dokumen

Selama tahun 2017 lalu DPP APINDO Riau telah menerbitkan beberapa dokumen yaitu:

1. Surat Keputusan (SK) Defenitif Kepengurusan DPK :
 - a. DPK Pekanbaru No. 058/KEP-DPP/APINDO/VI/2017 masa bakti 2017 - 2022
 - b. DPK Dumai No. 094/KEP-DPP/APINDO/X/2017 masa bakti 2017 – 2022
2. Surat Keputusan (SK) Caretaker untuk DPK :
 - a. DPK Rokan Hulu No. 091/KEP-DPP/APINDO/X/2017
 - b. DPK Bengkalis No. 092/KEP-DPP/APINDO/X/2017
 - c. DPK Kuantan Singingi No 100/KEP-DPP/APINDO/XII/2017
 - d. DPK Kepulauan Meranti No. 101/KEP-DPP/APINDO/XII/2017
 - e. DPK Pelalawan No. 102/KEP-DPP/APINDO/XII/2017
3. Surat Rekomendasi Hakim Ad Hoc APINDO :
 - a. Rekomendasi Hakim Ad Hoc APINDO untuk Hakim Mahkamah Agung (MA) No. 081/DPP/APINDO/IX/2017 tanggal 13 September 2017 atas nama Elias Hamonangan, SE., SH., MH
 - b. Rekomendasi Hakim Ad Hoc APINDO untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) No. 090/DPP/APINDO/IX/2017 tanggal 16 September 2017 atas nama :

1. Irfansyah, S.Psi., SH., MH
2. Mayandri Suzarman, SH
3. Syarifuddin, SH
4. Yuliazmen, SH
5. Muhammad Yuslinu Rabbi, SH
6. Darsum, SH
7. Rico Wan Armando, SH
8. Syafrizal, SH

E. Kegiatan Konsolidasi ke DPK

1. Konsolidasi dengan pengusaha dan perusahaan di Kuantan Singingi di Taluk Kuantan pada tanggal 13 Desember 2017 tentang pembentukan caretaker dan penyusunan



organisasi kepengurusan DPK APINDO Kuantan Singingi. Pertemuan memutuskan untuk menunjuk Sdr. Aris Susanto sebagai ketua caretaker DPK Apindo Kuantan Singingi. (Tim DPP : Sekretaris DPP Edi Darmawi, Anggota Bidang Pembinaan Keanggotaan DPP Rizki Amalia, Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki, dan staff sekretariat DPP Dian Oktaviani).

2. Konsolidasi dengan Caretaker DPK Rokan Hulu di Pasir Pengaraian pada tanggal 20 Desember 2017 tentang persiapan pelantikan pengurus DPK Rokan Hulu. Pertemuan dihadiri oleh Ketua



caretaker DPK APINDO Rokan Hulu, Hamulian. (Tim DPP : Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno, Anggota Bidang Pembinaan Keanggotaan DPP Rizki Amalia, Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki, dan staff sekretariat DPP Dian Oktaviani).

3. Konsolidasi dengan Caretaker DPK Bengkalis di Duri pada tanggal 27 Desember 2017 tentang tindak lanjut penyusunan kepengurusan defenitif dan agenda pelantikan. (Tim DPP : Sekretaris DPP Edi

Darmawi, Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki, dan staff sekretariat DPP Dian Oktaviani).

4. Konsolidasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang pembentukan caretaker DPK APINDO Rokan Hilir. (Tim DPP : Sekretaris DPP Edi Darmawi, Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki, dan staff sekretariat DPP Dian Oktaviani).



F. Menghadiri Acara DPK

Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DPK menjadi hal yang sangat penting bagi DPP APINDO Riau sebagai apresiasi dan dukungan atas kegiatan-kegiatan produktif. Kegiatan DPK yang dihadiri DPP APINDO Riau pada tahun 2017 terdiri dari:

1. Acara Musyawarah Kota DPK Apindo Dumai” pada tanggal 16 Mei 2017 di Gedung Pendopo Walikota Dumai yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Wakil Sekretaris Agus Setiawan.



2. Musyawarah Kota DPK Apindo Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2017 di Gedung Graha Pena Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Bendahara DPP R. Elwan Jumadri.



-

-

-
- 1st SOUTHEAST ASIA BUSINESS FORUM**
- AYO BERKUNJUNG DAN BERINVESTASI DI RIAU
- The Chance Of Trading Investment, Healthcare industries, And Tourism To Support National Economic Development
- Bank Riau Kepri tower ground 4
Riau-Indonesia
22 MEI 2017

2. Kemitraan dengan DPN APINDO dan Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kwan Yeow Scholl Singapura dalam hal Survey Tingkat Daya Saing Usaha 2017 pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Hotel Premiere.



3. Kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan "Member Gathering" tentang Sosialisasi Manfaat Tambahan JHT bagi tenaga kerja pada tanggal 14 September 2017 bertempat di Lounge Hotel Premiere yang dihadiri oleh lebih dari 120 orang peserta.



3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN

APINDO sebagai organisasi pengusaha yang telah tumbuh dan eksis terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Perhatian tersebut diantaranya dengan adanya undangan dalam berbagai event baik tingkat lokal, nasional, maupun regional. Semaksimal mungkin seluruh undangan yang masuk diupayakan untuk dipenuhi, namun demikian beberapa agenda undangan tidak dapat dihadiri mengingat waktu dan kesempatan dari pengurus untuk memenuhi undangan dimaksud. Namun demikian secara keseluruhan tingkat kehadiran atas undangan yang diterima lebih dari 90%.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dihadiri DPP APINDO Riau sebagai peserta/partisipan :

A. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah

JANUARI

1. Upacara Bulan K3 Nasional sekaligus tujuh belas hari bulan dengan Pembacaan Sambutan Menteri Tenaga Kerja RI oleh Gubernur Riau Ir.H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA dan Simulasi tanggap darurat pada tanggal 17 Januari 2017 di Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



2. Diskusi Ombudsman Riau bekerjasama dengan Akademi Berbagi Pekanbaru tentang Pengawasan Pelayanan Publik pada tanggal 21 Januari 2017 di Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.

FEBRUARI

3. Rapat pembahasan BKSP Riau pada tanggal 3 Februari 2017 di Kantor Disnakertransduk Riau dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



4. Menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala kantor Bank Indonesia Provinsi Riau pada tanggal 8 Febuari 2017 di Bank Indonesia Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
5. Menghadiri Peresmian Perpustakaan, Learning Center & e-recruitment oleh Gubernur Riau dan Acara Pengukuhan Pengurus IMA Chapter Riau” pada tanggal 13 Februari 2017 di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.
6. Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau “Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Riau” pada tanggal 17 Februari 2017 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.

7. Acara Musyawarah Daerah (Musda) 2 Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia pada tanggal 28 Februari 2017 di Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

MARET

8. Coffee Morning HIPMI Riau bekerjasama dengan Pegadaian Riau pada tanggal 1 Maret 2017 yang dihadiri Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Fahrial.

9. FGD Penilaian Tahap II Anugrah Pangripta Nusantara tahun 2017 pada tanggal 1 Maret 2017 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



10. Kegiatan "Indonesia Berdonor" LPP RRI Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2017 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



11. Pisah sambut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau pada tanggal 10 Maret 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



12. "Farewell Amnesty Pajak" Kakanwil Pajak Riau dan kepri pada tanggal 13 Maret 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.

13. Majelis Adat Penabalan Setia Amanah Masyarakat Adat Melayu Riau kepada Gubernur Riau Tuan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA pada tanggal 15 Maret 2017 di Balai Adat Melayu Riau Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.
14. Rakerwil KSBSI Riau tahun 2017 pada tanggal 16 Maret 2017 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru di hadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.
15. “Coffee Morning dengan tema Peluang Investasi Perdagangan, Industri Kesehatan dan Pariwisata dalam menopang ekonomi bangsa” kerjasama Nabila Production dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Provinsi Riau pada tanggal 22 Maret 2017 di hotel Royal Asnof Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Wakil Ketua DPP Bukhari.
16. Rapat Fasilitasi dalam rangka penyamaan persepsi terkait pengawasan peredaran obat dan makanan serta perdagangan lintas batas di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 22 Maret 2017 di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau yang dihadiri oleh Anggota Bidang Organisasi Muhammad Aminullah.
17. Forum Diskusi Ekonomi dan Outlook Regional Provinsi Riau oleh Bank Indonesia Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2017 dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



APRIL

18. Undangan Pekanbaru MX, Acara Peluncuran edisi Khusus, Dialog Khusus Ekonomi Bisnis dan MX Award 2017 pada tanggal 3 April 2017 di Graha Pena Pekanbaru di wakili oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



19. Peranan Tenaga Kerja dalam Mendorong Investasi dan Stabilitas Ekonomi oleh Komunitas Riau Membaca pada tanggal 20 April 2017 di Hotel Whiz Pekanbaru yang dihadiri oleh Ketua Bidang Sektor Aris Aruna.
20. “Perkembangan permasalahan Ipoleksosbudhankam di Provinsi Riau” oleh Komite Intelijen Daerah Riau pada tanggal 20 April 2017 di Kantor BIN Riau yang dihadiri oleh Wakil Ketua APINDO Bukhari.
21. “Acara Bincang JKN-KIS Bareng Andy F.Noya” dari BPJS Kesehatan pada tanggal 26 April 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
22. “Acara Diseminasi System Jaminan Sosial dan Bimbingan Teknis Pengupahan” pada tanggal 26 April 2017 di Hotel Furaya Pekanbaru yang diwakili oleh Wakil Sekretaris DPP Agus Setiawan.
23. “Persiapan memperingati hari May Day” Disnakertransduk Riau pada tanggal 27 April 2017 dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
24. “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dekonsentrasi koordinasi dan supervise penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu se Provinsi Riau” oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 27 April 2017 diwakili oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.



MEI

25. Aksi Mayday KSBSI Riau “Mencari Solusi permasalahan KSBSI Riau” pada tanggal 2 Mei 2017 di Kantor Disnakertransduk Riau dihadiri Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno.



26. Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (DPD PERWIRA) Provinsi Riau periode 2017 – 2022 pada tanggal 4 Mei 2017 di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru diwakili oleh Koordinator Bidang Wanita Pengusaha dan UKM Tifani.
27. Undangan Fakultas Ekonomi Universitas Riau “Acara Visitasi” pada tanggal 5 Mei 2017 di Fakultas Ekonomi Universitas Riau diwakili oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.
28. Acara Penyerahan Penghargaan K3 serta Penutupan Peringatan Bulan K3 Provinsi Riau oleh Gubernur Riau pada tanggal 23 Mei 2017 di Hotel Grand Central Pekanbaru diwakili oleh Koordinator Sektoral Aris Aruna.
29. Lokakarya Kurikulum berbasis KKNi Fakultas Ekonomi dalam rangka menuju Unilak Unggul 2030 pada tanggal 24 Mei 2017 di Aula Perpustakaan Universitas Lancang Kuning diwakili oleh Sekretaris Eksekutif DPP Fahrial.

J U N I

30. Sosialisasi Permen LHK nomor P.17 tahun 2017 oleh Dewan Perwakilan Daerah RI pada tanggal 10 Juni 2017 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2017 yang dihadiri oleh Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno dan Bendahara R. Elwan Jumandri.
31. Forum Diskusi Ekonomi dan Outlook Regional Provinsi Riau oleh Bank Indonesia Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2017 di Kantor BI Pekanbaru dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Bukhari.

J U L I

32. Penelitian Sekretariat Jenderal dan badan keahlian dewan Perwakilan Rakyat RI (Achmad Sani Alhusain) tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur pada tanggal 12 Juli 2017 di Sekretariat DPP APINDO dihadiri oleh Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno, Sekretaris DPP Edi Darmawi, dan Wakil Sekretaris Heri Susanto.
33. Pertemuan Lanjutan Tim menyikapi Permen LHK nomor P.17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri pada tanggal 14 Juli 2017 di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Riau.

34. Pelantikan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila dan halal bi halal 1438 H pada tanggal 14 Juli 2017 di Hotel Grand Central Pekanbaru diwakili oleh Koordinator Bidang Sektoral Aris Aruna.
35. Halal Bi Halal bersama masyarakat Siak di Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2017 di Hotel Aryaduta Pekanbaru diwakili oleh Wakil Ketua DPP APINDO Riau Bukhari.
36. Ramah Tamah Gubernur Riau dengan Menteri Luar Negeri Singapura pada tanggal 25 Juli 2017 di Rumah Kediaman Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Wakil Ketua DPP Bukhari.



AGUSTUS

37. Pertemuan pembahasan rencana tindak lanjut dan program BKSP Riau dengan pengurus BKSP Provinsi pada tanggal 2 Agustus 2017 bertempat di Kantor Disnakertransduk Riau diwakili oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.



38. Peringatan HUT Provinsi Riau ke-60 pada tanggal 9 Agustus 2017 di Kantor Gubernur Riau di hadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
39. Peringatan HUT RI ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017 di Kantor Gubernur Riau di hadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

40. Forum Dialog Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dengan Polri Tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2017 di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru dihadiri oleh Ketua



DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno, Sekretaris DPP, Edi Darmawi, Bendahara DPP R. Elwan Jumandri, dan Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.

SEPTEMBER

41. Diseminasi Pedoman dan Regulasi BNSP pada tanggal 8 September 2017 di Hotel Jatra Pekanbaru diwakili oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.



42. Pembahasan BPJS Ketenagakerjaan Award tahun 2017 pada tanggal 14 September 2017 di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Riau diwakili oleh Wakil Sekretaris DPP Zulfikar.



43. Pisah Sambut Kapolda Riau dari Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara kepada Brigjen Pol. Drs. Nandang MH, pada tanggal 8 September 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris DPP Edi Darmawi.

44. Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagai Wadah Komunikasi antara Regulator dan pelaku Usaha Provinsi Riau pada tanggal 12 September 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi



45. Stakeholder Advisory Committee pembahasan tentang penilaian penerapan Kebijakan Pembangunan Hutan Berkelanjutan (SFMP 2.0) April Group pada tanggal 12 September 2017 di Hotel Premiere Pekanbaru dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Bukhari.
46. Pembahasan BPJS Ketenagakerjaan Award 2017 pada tanggal 14 September 2017 di Kantor Sekdaprov Riau dihadiri oleh Wakil Sekretaris DPP Zulfikar.
47. Rapat LKS Tripartit Riau pada tanggal 28 September 2017 di Kantor Disnakertransduk Riau dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno, Wakil Ketua DPP Bukhari, dan Sekretaris DPP Edi Darmawi.
48. Seminar Sehari BKSP Riau dengan thema “Penerapan Sistem Manajemen K3 Guna Mendukung Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Riau dalam Era Globalisasi menuju Riau Kompeten” pada tanggal 28 September 2017 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki.

OKTOBER

49. Persiapan pembahasan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2018 pada tanggal 4 Oktober 2017 di kantor Disnakertransduk Riau dihadiri oleh Anggota Dewan Pengupahan DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri, Agus Setiawan, dan Elfenni Erdianta.



50. Peringatan Hari Ulang Tahun ke 72 TNI pada tanggal 5 Oktober 2017 di Jalan Gajah Mada Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

51. Undangan Kadin Riau, Pertemuan / Diskusi dengan Peserta Diklat Sesdilu Ke 59 pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kadin Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.

52. Workshop Partisipasi Masyarakat “Pendampingan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Masyarakat” Ombudsman Riau pada tanggal 12 Oktober 2017 di Hotel Premiere Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.



53. Pembukaan Riau Expo 2017 pada tanggal 14 Oktober 2017 di SKA CoEx Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

54. Riau Investmen Forum pada tanggal 16 Oktober 2017 di Menara Dang Merdu Bank RiauKepri dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



55. Pembukaan Job Fair 2017 pada tanggal 16 Oktober di Hotel Mutiara Merdeka dihadiri oleh Koordinator Bidang Wanita Pengusaha dan UKM Tiffani.

56. Pembahasan Draft Matriks Sustainable Development Goals (SDGs) Riau oleh Bappeda Riau pada tanggal 17 Oktober 2017 di Hotel Grand Central Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.

NOVEMBER

57. Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke 72 tahun 2017 pada tanggal 10 November 2017 di Kantor Gubernur Riau dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

58. KADIN Riau MEA Expo pada tanggal 23 November 2017 di Bandar Seni Raja Ali Haji Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

59. Bumi Fashion Show Organic & Songket by Arsilia Arsyadjuliandi & Evelyn pada tanggal 24 November 2017 bertempat di acara KADIN Riau MEA Expo dihadiri oleh Koordinator Bidang Wanita pengusaha dan UKM Tifani.

DESEMBER

60. Rapat Tim Pelaksana Provinsi Liga Pekerja Indonesia 2018 pada tanggal 5 Desember 2017 di Kantor Disnakertransduk Riau dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

61. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 “Memperkuat Momentum” pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



62. Pertemuan dan Diskusi Bisnis bersama Duta Besar Kanada pada tanggal 12 Desember 2017 di KADIN Riau dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.



63. Rapat Konsultasi Publik Draft RAD SDGs Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2017 di Hotel Grand Central Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arpi Marzuki.



64. Pelantikan Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru masa bakti 2017 – 2020 pada tanggal 21 Desember 2017 di Kantor Walikota Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris Edi Darmawi



B. Kegiatan Tingkat Nasional

1. CEOs Gathering DPN APINDO “Outlook Perekonomian Indonesia 2017” pada tanggal 3 Februari 2017 di DPN APINDO Jakarta dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris Edi Darmawi.



2. Forum Silaturahmi dan Konsolidasi DPN APINDO pada tanggal 1 – 3 Maret 2017 di Jakarta dihadiri Bendahara DPP R. Elwan Jumandri, Anggota Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, dan Pengupahan Aldho Renatan, dan Hakim Ad Hoc PHI Tumpak Tinambunan.

3. Sosialisasi Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Riau tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 di Hotel Planet Holiday – Batam dihadiri Bendahara DPP R. Elwan Jumandri.



4. TOT Penyusunan Struktur dan Skala Upah pada tanggal 20 – 25 November 2017 di Hotel Salak The Herritage Bogor yang diwakili Anggota Dewan Pengupahan Riau, R. Elwan Jumandri.



5. Try Out Dialog Sosial Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pada tanggal 22 – 24 November 2017 di Palembang yang diwakili oleh Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi.



C. Kegiatan Tingkat Regional

1. Menghadiri undangan Asia Competitiveness Institute (ACI) di Singapura pada tanggal 22 November 2017 dengan utusan Wakil Ketua APINDO Riau, Bukhari, di Singapura.



4. PELAYANAN DATA DPN

Salah Satu tugas DPP APINDO Riau yaitu memberikan dukungan dan pelayanan data baik permintaan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) baik maupun meneruskan surat DPN ke DPK. Selama tahun 2017, DPP APINDO Riau telah melaksanakan pelayanan data DPN sebagai berikut:

A. Permintaan Data

1. Perda Kabupaten Siak No. 19 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
2. Peraturan Gubernur Riau tentang UMP tahun 2018
3. Data perusahaan peserta Survey Daya Saing Usaha
4. Laporan Kegiatan DPP 2017
5. Data perusahaan member DPP APINDO Riau 2017
6. Data DPK dan Anggota DPK se-Riau
7. Data Peluang investasi di Provinsi Riau

B. Meneruskan Surat ke DPK

1. Surat permintaan data anggota DPK dan peluang investasi daerah.
2. Surat Edaran Pedoman Tim APINDO yang duduk di Dewan Pengupahan perihal penetapan upah minimum sektoral.

5. KEGIATAN AUDIENSI

Sejumlah kegiatan audiensi juga telah dilaksanakan DPP APINDO Riau sebagai upaya strategis memperkenalkan dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, lembaga keuangan, kepolisian/ militer, dan mitra lainnya yang terkait fungsi tugas APINDO. Selama tahun 2017 APINDO Riau telah melaksanakan sejumlah kegiatan audiensi yang terdiri dari:

1. Audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Riau pada tanggal 17 januari 2017 yang dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno, Wakil Ketua Bukhari, Sekretaris DPP Edi Darmawi, dan Wakil Bendahara Mayunir.



2. Audiensi dengan SKK Migas Wilayah Sumbagut pada tanggal 31 Januari 2017.



3. Audiensi dan Silaturahmi dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau pada tanggal 31 Januari 2017.

4. Audiensi dengan Kapolda Riau Bp. Irjen Pol Drs. Zulkarnain pada tanggal 23 Maret 2017.



5. Audiensi dengan Gubernur Riau Bp. Asyadjuliandi Rachman pada tanggal 28 April 2017.



6. Audiensi dengan Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 8 Mei 2017.



7. Audiensi dengan BPJS Kesehatan Provinsi Riau pada tanggal 7 Juli 2017.

8. Audiensi dengan Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI. Edi Natar Nasution, S.SP



6. SEBAGAI NARASUMBER

Pengurus DPP APINDO Riau selama masa tahun 2017 juga menerima beberapa undangan permintaan sebagai narasumber kegiatan, yaitu :

1. Narasumber Pelatihan “Peluang dan Pengembangan Jasa Kontraktor Profesional” pada tanggal 15 Agustus 2017 di Training Center PT. Arara Abadi – Bunut dengan utusan Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
2. Narasumber Pelatihan Penyusunan Struktur Skala Upah pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan utusan DPP APINDO Riau Koordinator Hubungan Industrial dan Pengupahan, Elfenni Erdianta.
3. Narasumber Pelatihan Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi UMP tahun 2018 pada tanggal 23 – 25 November 2017 dengan utusan DPP APINDO Riau Koordinator Hubungan Industrial dan Pengupahan, Elfenni Erdianta.



7. SEBAGAI ANGGOTA TIM

A. Dewan Pengupahan

DPP APINDO Riau juga merupakan bahagian dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Perihal Dewan Pengupahan ini adalah sebagaimana tertera pada Bab Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengupahan.

B. LKS Tripartit

Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial sebelum meningkat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.16/I/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 dengan Ketua Gubernur Riau dan anggota yang terdiri dari Disnekrtrans Provinsi Riau, Setda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, KADIN Riau, APINDO Riau, DPW SARBUMUSI Riau, SBSI Riau, DPP SBCI Riau, F.SBSI Riau, dan DPD K.SPSI Riau. Dari DPP APINDO Riau telah ditetapkan 4 orang sebagai anggota LKS Tripartit yaitu:

1. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno
2. Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP APINDO Riau, Huiniati
3. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO Riau, Bukhari
4. Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi

C. Pengurus BKSP Riau

Guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan sumber daya manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri di Provinsi Riau, maka telah dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP). Gubernur Riau melalui Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1147/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 yang salah satunya menunjuk Ketua DPP APINDO Riau sebagai Anggota Pengurus BKSP Riau.

KEANGGOTAAN

Kami dari DPP memandang bahwa keanggotaan merupakan hal yang sangat penting, karena tidak ada organisasi yang mampu eksis tanpa dukungan anggota. Oleh karena itu DPP APINDO Riau berupaya untuk memperkuat barisan keanggotaan agar ke APINDO semakin kuat pula membumi di Riau ini.

Keanggotaan perusahaan sebagai anggota APINDO di tingkat DPP pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Tercatat jumlah anggota pada tahun 2017 adalah sebanyak 50 perusahaan, yang terdiri dari:

A. Platinum Members

Platinum Members APINDO Riau yaitu perusahaan-perusahaan swasta nasional yang memberikan investasi tetap bulanan ke DPP APINDO Riau sebesar Rp. 2.000.000 atau lebih. Terdapat 7 perusahaan yang termasuk dalam platinum members ini yaitu :

No.	PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	HOME BASE
1	PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)	Migas	Duri
2	PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP)	Pulp & Paper	Pkl. Kerinci
3	PT. Indah Kiat Pulp And Paper (IKPP)	Pulp & Paper	Perawang
4	PT. Arara Abadi	Kehutanan	Perawang
5	PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN)	Kelapa Sawit	Pekanbaru
6	PT. Bumi Siak Pusako (BSP)	Migas	Pekanbaru
7	PT. Schlumberger	Migas	Minas

B. Anggota Biasa

Anggota biasa yaitu perusahaan yang tergabung sebagai members DPP APINDO Riau yang berkontribusi memberikan iuran rutin bulanan dibawah nominal iuran Platinum Members. Terdapat 90 perusahaan yang tergabung pada kelompok ini. Data perusahaan Anggota Biasa terlampir.

TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN

1. DASAR HUKUM DEWAN PENGUPAHAN

Untuk menetapkan nilai upah buruh maka pemerintah telah membentuk Dewan Pengupahan Propinsi Riau yang terdiri dari 29 orang anggota. Dewan Pengupahan ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019. Dewan pengupahan ini diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan keanggotaan terdiri dari :

- Disnakertrans Provinsi Riau
- Biro Hukum Setda Provinsi Riau
- Bappeda Provinsi Riau
- Disperindag Provinsi Riau
- BPS Provinsi Riau
- BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau
- KADIN Provinsi Riau
- APINDO Provinsi Riau
- SPTP – BUN PTPN V
- DPW Sarbumusi Provinsi Riau
- Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Provinsi Riau
- DPP SBCI Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (PD FSP KEP-SPSI) Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PD FSPPP-SPSI) Provinsi Riau
- PW-SBSI Korwil Provinsi Riau

Adapun APINDO Riau dalam Dewan Pengupahan ini diwakili oleh 4 orang dari Dewan Pengurus Provinsi:

N A M A	JABATAN
R. Elwan Jumanri, SH., MH	Bendahara
Elfenni Erdianta Br. Bangun, SH, MH	Koord. Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, & Pengupahan
Delveri, SE. Ak	Wakil Sekretaris
Agus Setiawan, SE	Wakil Sekretaris

2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU

Tugas dan tanggung jawab dewan pengupahan Dewan Pengupahan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Upah Minimum Provinsi Riau (UMP)
2. Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)
3. Menerapkan Sistem Pengupahan di tingkat Provinsi

Selanjutnya dalam proses penetapan upah minimum pemerintah telah membuat suatu dokumen yang disebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan. PP ini memberikan rumusan-rumusan untuk memutuskan besaran nilai upah minimum baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2017 lalu, Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada PP No. 78 tahun 2015 dan dihasilkan suatu kesepakatan yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 846/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2018 (terlampir).

Melalui SK tersebut telah diterakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 di Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 2.464.154,06 (*dua juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah enam sen*), atau besar kenaikan dari tahun 2017 adalah sebesar 8,71%.

3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR MIGAS

Pada tahun 2017 DPP APINDO juga telah menjadi fasilitator penetapan upah minimum sektor migas melalui perundingan bersama 6 serikat buruh sektor migas, yaitu:

- DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Riau
- Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Provinsi Riau
- Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Provinsi Riau
- DPW Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Provinsi Riau
- DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau

Hasil kesepakatan bersama melalui perundingan tersebut maka dihasilkan suatu keputusan yang selanjutnya pada tanggal 5 April 2017 ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: 311/IV/2017 tentang Upah Minimum Sektor Minyak Bumi

dan Gas Alam Provinsi Riau tahun 2017 sebesar Rp. 2.690.015,- (*Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima belas rupiah*) per bulan atau naik sebesar 8,25 % dari tahun sebelumnya.

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA

1. KONDISI DPK SE RIAU

Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota (DPK) APINDO di Provinsi Riau secara umum perlu untuk kami laporkan. Sampai akhir tahun 2017 terdapat 6 DPK yang berstatus defenitif, 5 DPK masih berstatus caretaker, dan sementara di Kabupaten Rokan Hilir belum terbentuk caretaker. Berikut data status kepengurusan DPK APINDO se Provinsi Riau :

	Kota/ Kabupaten	Status	Ketua
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	DR. Fahrial, SP, SE, ME, CRBD
2.	Kota Dumai	Defenitif	Ruslan
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	Muhammad Amin
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	Kamaruzzaman
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	Malik
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	Said Yusuf
7.	Kabupaten Pelalawan	Caretaker	R. Elwan Jumanri
8.	Kabupaten Bengkalis	Caretaker	Mustafa
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	Hamulian Nasution
10.	Kabupaten Rokan Hilir	-	
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	Aris Susanto
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	Bastian

Sepanjang tahun 2017 DPP telah melantik sebanyak 2 DPK sebagai pengurus defenitif DPK APINDO Pekanbaru dan DPK APINDO Dumai. Sampai akhir tahun 2017 DPP berupaya untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak termasuk turun langsung ke beberapa kabupaten yaitu Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis, dan Kab. Rokan Hilir. Konsolidasi dimaksud adalah untuk meningkatkan status pengurus dari caretaker menjadi defenitif. Sebagai program dan target kami, selambat-lambatnya pada bulan April 2018 seluruh DPK sudah defenitif.

2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK

Keberadaan DPK APINDO di setiap Kabupaten Kota menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan visi APINDO. Salah satu tugas Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota adalah mengawal pelaksanaan perhitungan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang dilaksanakan pada setiap tahun disamping sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Provinsi dalam penyelesaian masalah hubungan industrial yang terjadi pada perusahaan-perusahaan anggota APINDO.

Aktivitas DPK dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota pada tahun 2017 lalu telah berhasil mengawal besar kenaikan upah tahun 2018 secara umum rata sebesar 8,71% pada 11 Kab./ Kota, kecuali Kab. Indragiri Hulu yaitu sebesar 12,71%.

	Kota/ Kabupaten	UMK	%Tase Kenaikan
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.557.486,73,-	8,71 %
2.	Kota Dumai	Rp. 2.886.655,44,-	8,71 %
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.525.823,52,-	8,71 %
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.751.076,40,-	12,71 %
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.546.162,14,-	8,71 %
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.516.638,71,-	8,71 %
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 2.919.458,35,-	8,71 %
8.	Kabupaten Siak	Rp. 2.600.614,14,-	8,71 %
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.561.250,65,-	8,71 %
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.597.989,90,-	8,71 %
11.	Kabupaten Kep. Meranti	Rp. 2.545.505,06,-	8,71 %
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.506.141,78,-	8,71 %

Besar kenaikan upah tersebut diatas telah ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 880/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau tahun 2018 (terlampir).

3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK

Berikut kondisi keanggotaan perusahaan di DPK APINDO pada setiap Kabupaten/ Kota per bulan Desember 2017:

	Dewan Pimpinan Kab./ Kota	Status	Jumlah Members
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	21
2.	Kota Dumai	Defenitif	50
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	29
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	10
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	42
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	6
7.	Kabupaten Pelalawan	Caretaker	33
8.	Kabupaten Bengkalis	Caretaker	17
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	-
10.	Kabupaten Rokan Hilir	-	-
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	4
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	2
	TOTAL		203

APINDO TRAINING CENTER

1. KEGIATAN

APINDO Training Center (ATC) merupakan wadah yang didirikan sebagai wadah peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi karyawan dari perusahaan-perusahaan members APINDO Riau. Sejak terlahir pada tanggal 24 Oktober 2013 ATC telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan diantaranya:

NO	JENIS PELATIHAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	Strategi Implementasi Praktek Outsourcing sesuai dengan Permenakertrans No. 19/2012 dan Surat Edaran Menakertrans No. SE.04/MEN/VIII/2013	2013
2	Enterpreneurship Training	2013
3	Lokakarya “Menghindari Multitafsir Implementasi Permenakertrans No. 19/2012”	2013
4	Pelatihan Pembuatan “Perjanjian Kerja Waktu (Tertentu dan Tidak tertentu)”	2014
5	Basic Leadership Skill Training	2014
6	Workshop Teknik Perancangan Kontrak Bisnis	2014
7	Workshop Implementasi UU No. 24 / 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	2014
8	Industrial Relation Training	2014
9	Training Sertifikasi Ahli K3 Umum	2014
10	Workshop Ketenagakerjaan “Praktikal Hukum Ketenagakerjaan dari Perspektif Pengusaha”	2016
11	Workshop Ketenagakerjaan “Strategi Penyusunan Perjanjian Kerja, PP, dan PKB Secara Efektif”	2016
12	Workshop Ketenagakerjaan “Menyusun Struktur dan Skala Upah”	2017

ATC Riau sebagai wadah implementasi misi APINDO dalam meningkatkan SDM perusahaan-perusahaan di Riau sekaligus sebagai unit business center DPP APINDO Riau, sudah mempersiapkan agenda-agenda training yang akan ditawarkan kepada pihak perusahaan member maupun non member. Keberadaan ATC sebagai wadah *capacity building* bagi SDM perusahaan menjadi sangat penting ke depan mengingat tantangan-tantangan dunia usaha untuk eksis dan tumbuh kembang dalam hubungannya dengan *industrial relation* semakin besar. Dunia usaha semakin membutuhkan personil yang handal dan diakui (tersertifikasi) untuk mampu bersaing merebut pasar lokal, nasional, dan global.

2. STRUKTUR MANAJEMEN ATC

APINDO Training Center (ATC) yang berdiri dalam status badan hukumnya sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau melalui Akta Notaris Neni Sanitra, SH No. 29 Tanggal 23 Januari 2016 yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0005935.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau.

Adapun struktur manajemen PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau atau ATC adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: WIJATMOKO RAH TRISNO
Komisaris	: EDI DARMAWI
Direktur Utama	: R. ELWAN JUMANDRI, SH., MH
Direktur Riset, Pelatihan, & Sertifikasi	: SYUKRI HADI, SE.Ak, CA, GMQ, MIM
Direktur Operasional & Marketing	: YULI RIAMTO WIDODO, S.Sos
Direktur Administrasi & Keuangan	: RHONNY RIANSYAH, SE.Ak
Staff Ahli	: DRS. MACHASIN, M.Si
Staff Ahli	: DR. FAHRIAL, SP, SE, ME, CRBD

POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2018

Menjawab tantangan pada tahun 2018 dan permasalahan-permasalahan pada tahun 2017 lalu, maka DPP APINDO Riau menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya penguatan peran dan fungsi organisasi. Beberapa rencana program sebagai resolusi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan penguatan keanggotaan (*members*) DPP APINDO Riau

Members merupakan kekuatan utama bagi APINDO dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu DPP menilai bahwa program revitalisasi keanggotaan pada tahun 2018 menjadi hal yang krusial.

2. Mendefinitifkan seluruh DPK APINDO se Provinsi Riau

Mendefinitifkan DPK yang saat ini masih berstatus caretaker menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan agar eksistensi APINDO di Kabupaten/ Kota se Riau semakin kuat.

3. Revitalisasi dan Penguatan Fungsi ATC

ATC sebagai wadah training akan kembali dikelola dengan baik agar bisa menjadi wadah peningkatan kapasitas karyawan anggota APINDO Riau.

4. Restrukturisasi Dewan Kepengurusan

Restrukturisasi ini penting mengingat beberapa orang anggota kepengurusan sebagai perwakilan manajemen perusahaan di DPP APINDO Riau mengalami mutasi tugas di luar Riau dan ada yang sudah meninggal dunia.

5. Penguatan hubungan kemitraan

Penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga strategis ini penting untuk membangun kerangka berfikir yang sama dalam membangun ekonomi daerah melalui pengembangan investasi dan iklim usaha yang kondusif.

PENUTUP

DPP APINDO Riau pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder baik dunia usaha, pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang telah menjadi mitra kerja selama ini. Kami yang kini terus berbenah dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi besar APINDO, masih dan akan terus membutuhkan kemitraan dengan seluruh stakeholder.

Kepada members kami yang telah memberikan dukungan financial dalam bentuk investasi bulanan, kami ucapkan terima kasih karena dukungan tersebut telah menjadi darah pergerakan DPP APINDO Riau selama ini. Kami berharap dukungan ini akan terus mengalir agar tugas-tugas besar di masa yang akan datang khususnya dalam pembangunan dunia usaha Riau menjadi lebih baik dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.

Selanjutnya kepada Pemerintah Provinsi Riau kami ucapkan terima kasih pula karena selalu memberikasn ruang kepada kami untuk memberikan pandangan dan pemikiran konstruktif terhadap persoalan-persoalan dunia usaha Riau. Saling dukung dan keterbukaan ini kami yakini menjadi sebuah kekuatan bersama untuk membangun iklim investasi Riau yang lebih kondusif dan kompetitif, siap bersaing di dunia global dan kami yakin Riau akan menjadi provinsi terdepan dalam pembangunan ekonomi nasional.



SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) APINDO RIAU

 Hotel Furaya Lt. 1, Ruang Akasia – Jl. Jendral Sudirman No. 72 - 74 Pekanbaru 28151 – Riau

 0761-8656545

 apindo_riau@yahoo.com

 apindoriau.or.id